

**PENGARUH PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 TERHADAP GAJI PNS GOLONGAN IV
DI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**

ENTANG SETIAWAN
DOSEN POLITEKNIK PIKSI GANESHA
entang.setiawan@piksi-ganehsa-online.ac.id

RENNY TRIANA
renny_Triana@gmail.com

ABSTRACT

The main objective of the research is to analyze the influence of Pemptongan PPh Pasal 21 to the civil servants rank IV salaries at Dinas Kesehatan Bandung. The descriptive method was employed in this research using quantitative approach. The data collection was used in this research was done by observations, interviews, documentations, and completed by literature study. The data which used was withholding PPh Pasal 21 and civil servants rank IV salaries, meanwhile, the technique used to analyze the data were the Pearson product Moment correlation analysis, normality test, coefficient of determination, and linear regression analysis. The result obtained from statistical is found that the increase of withholding income tax was always followed by salaries. The Pearson Product Moment obtained 0,910, bigger than 0,80, which then shows that withholding PPh Pasal 21 significant effect on civil servants rank IV salaries. The coefficient of determination result is 82,80%, it means that income tax cuts of article 21 influenced by civil servants rank IV salaries while the rest 17,2% influenced by other variables that is not described.

Keywords: *Withholding Income Tax Article 21, Salaries.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah yang merupakan roda penggerak pemerintahan membutuhkan dana yang cukup banyak untuk pembiayaan pembangunan bangsa, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, pemerintah berperan penting dalam mengefektifkan sumber penerimaan negara, yaitu pajak dimana pajak tersebut merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu penerimaan Negara dalam perpajakan adalah Pajak Penghasil pasal 21. PPh pasal 21 sangat berhubungan dengan orang pribadi yang memperoleh penghasilan karena ia bekerja, memberikan jasa, atau melaksanakan kegiatan, dimana atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi tersebut akan dipotong PPh pasal 21. Gaji juga merupakan salah satu pengeluaran instansi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien, karena gaji merupakan unsur terpenting dalam perputaran dunia kerja yang memerlukan ketelitian dalam penempatan, penggolongan, pencatatan serta pembayarannya. Masalah gaji dalam setiap instansi memerlukan perhatian serius dan penanganan yang hati-hati untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan. Gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tergantung golongan, itu sebabnya gaji antara pegawai negeri sipil yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Dan akan mengakibatkan perhitungan nilai pajak penghasilan setiap pegawai negeri sipil akan berbeda pula.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2016:1):

“pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Dalam Siti Resmi (2016:70) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

3. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016:197) “Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yaitu: pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan”.

4. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib Pajak PPh pasal 21 dalam Mardiasmo (2016:201) adalah:

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:
 - 1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - 2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - 3) Olahragawan.
 - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya telekomunikasi elektronika, fotografi, ekonomi, dan social serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - 7) Agen iklan.
 - 8) Pengawas atau pengelola proyek.
 - 9) Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan.
 - 11) Petugas dinas luar asuransi.
 - 12) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

5. Pengertian Gaji

Menurut Mardi (2011:107), Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau instansi kepada pegawai.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2015:29) metode Statistik Deskriptif adalah statistik yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Data Kuantitatif menurut Sugiyono (2015:23) adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*skoring*).

2. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variable *stimulus, predictor, antecedent* (Variabel X). Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam hal ini yang merupakan variabel independen adalah PPh Pasal 21 pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

b. Variabel Dependen

Sering disebut sebagai variabel *output, kriteria, konsekuen* (Variabel Y). Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam hal ini yang merupakan variabel dependen adalah Gaji PNS Golongan IV pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki objek/subjek yang diteliti tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan gaji PNS golongan IV di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sedangkan jumlah sampel yang diteliti adalah laporan rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Gaji PNS golongan IV di Dinas Kesehatan Kota Bandung periode 2012-2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:137), Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data". Yang diperoleh dengan wawancara dengan tujuan agar penulis memperoleh data dan informasi dengan cara bertanya langsung. Menurut Sugiyono (2012:225), "Data Sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan secara langsung kepada pengumpul data. Yang diperoleh dengan studi kepustakaan dan berperan untuk mengembangkan dan membandingkan hasil penelitian. Studi kepustakaan diperoleh melalui buku-buku atau artikel-artikel yang berhubungan dengan judul penelitian sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2014:169)

Analisis deskriptif penelitian ini meliputi penyajian data melalui tabel dan diagram batang.

b. Analisis Inferensial

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mendekteksi apakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik yang memenuhi hakikat naturalistik. Uji normalitas data juga digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal atau tidak.

Dalam penelitian ini, uji normalitas data menggunakan teknik *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan *software* SPSS 21.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan:

- (1) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) < 0,05 artinya data tidak berdistribusi normal.
- (2) Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data berdistribusi normal.

2) Analisis Korelasi

Analisis Korelasi PPM (*Pearson Product Moment*) ini digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Karena skala yang digunakan dalam analisis ini berbentuk nominal, maka digunakan rumus *product moment person* sebagai berikut:

$$R_{yx_1x_2} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n(\sum x^2) - (\sum x)^2][n(\sum y^2) - (\sum y)^2]}}$$

Dimana :

R = Korelasi *product moment person*

N = Jumlah data

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali variabel X dan Y

$\sum X$ = Variabel X

$\sum Y$ = Variabel Y

$(\sum X)^2$ = Jumlah kuadrat variabel X

$(\sum Y)^2$ = Jumlah kuadrat variabel Y

Sugiyono (2013:184)

Dan untuk menguji signifikansi hubungan yaitu apakah hubungan yang ditemukan tersebut untuk seluruh populasi maka perlu di uji signifikasinya. Rumus signifikansi *product moment* sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Adapun perhitungan analisis korelasi dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 21.

3) Koefisien Determinasi

Adalah tingkat pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persentase. Rumus Koefisien Determinasi adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100 \%$$

Dimana :

KD= Koefisien Determinasi

R = Hasil Perhitungan Korelasi

Adapun perhitungan koefisien deter-minasi dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 21.

4) Analisis Regresi Sederhana

“Regresi Linier Sederhana dapat digunakan untuk memperdiksi seberapa jauh hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel *independent* dengan satu variabel *dependent*” (Sugiyono, 2013:270). Analisis regresi sederhana, selain digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara suatu variabel *dependent* dan satu variabel *independent*.

Adapun dalam penelitian ini per-hitungan analisis regresi linear sederhana menggunakan program SPSS 21.

5) Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis atau uji t dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah suatu hipotesis sebaiknya diterima atau ditolak oleh peneliti dan untuk menguji korelasi itu benar-benar terjadi maka diadakan pengujian, maka digunakan uji-t. Adapun menurut Sugiyono (2013:85) rumusnya sebagai berikut :

$$t_h = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

th = t hitung

r = koefisien korelasi

n-2 = derajat kebebasan

Ho: t hitung < t tabel, sig > 0,05 maka tidak signifikan.

Ha: t hitung > t tabel, sig < 0,05, maka signifikan.

Adapun dalam penelitian ini per-hitungan uji hipotesis menggunakan program SPSS 21.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tahun 2012 : Rp 552.627.058,00

Tahun 2013 : Rp 516.353.925,00 atau turun Rp 36.273.133,00

Tahun 2014 : Rp 630.595.352,00 atau naik Rp 114.241.427

Tahun 2015 : Rp 870.713.170,00 atau naik Rp 240.117.818, dan

Tahun 2016 : Rp 846.487.911,00 atau mengalami penurunan Rp 24.225.259 .

2. Perhitungan Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV

Gaji pegawai tetap:

Tahun 2012 : Rp 681.547.700,00

Tahun 2013 : Rp 775.191.700,00 atau naik Rp 93.644.000,00

Tahun 2014 : Rp 779.755.300 atau naik Rp 4.563.600,00

Tahun 2015 : Rp 904.260.800,00 atau naik Rp 124.505.500,00, dan
Tahun 2016: Rp 987.329.400,00 atau mengalami kenaikan Rp 83.068.600,00 .

3. Pengaruh Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Terhadap Gaji PNS

a. Korelasi Pearson

Diketahui bahwa peranan variabel X (PPH Pasal 21) terhadap variabel Y (Gaji Pegawai Negeri Sipil) adalah sebesar 0.910. karena hasil perhitungan korelasi tersebut berada pada interval 0.80-0.1000, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa derajat tingkat hubungan antara PPh Pasal 21 terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil berada pada kategori sangat kuat.

b. Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier secara umum adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 394605249.000 + 0.636 X$$

Maka persamaan regresi linear sederhana dapat diartikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi sebesar 0.636 menyatakan bahwa setiap peningkatan Rp. 1 pada akan meningkatkan Gaji Pegawai Negeri Sipil Rp. 0.636.
2. Konstanta sebesar Rp. 394605249.000 menyatakan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 tidak dipertimbangkan ($X=0$), maka Gaji Pegawai Negeri Sipil Rp. 394605249.000.

c. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi diperlukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X (Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21) terhadap variabel Y (Gaji Pegawai Negeri Sipil), perhitungannya diperoleh dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi.

Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0.828 atau 82.80%. Artinya Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 berpengaruh 82.80% terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV sedangkan sisanya 17.2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

d. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan:

1. H_0 ditolak jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $< 0,05$
2. H_0 diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,094 lebih besar dari 0,05 ($0,094 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

e. Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan uji t untuk menguji pengaruh pemotongan pajak penghasilan (PPH) terhadap gaji pegawai negeri sipil golongan IV.

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} 4,797 sedangkan nilai t_{tabel} dengan $\alpha=0,05$ dan $n=5$, uji dua pihak (*two tail test*) diperoleh sebesar 3,182. ($t_{hitung} > t_{tabel}$, $4,797 > 3,182$), sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara pph pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil golongan IV.

Dengan demikian hipotesis penelitian dapat diterima karena setelah dilakukan uji t dapat disimpulkan bahwa pph pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap gaji pegawai negeri sipil golongan IV pada Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan hasil dari uji hipotesis dan analisis data adalah sama dengan jawaban atau pernyataan sementara, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pph pasal 21 terhadap gaji pegawai negeri sipil golongan IV di Dinas Kesehatan Kota Bandung.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat pemotongan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2012-2016 mencapai Rp. 3.416.777.416,00 .
2. Tingkat gaji pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2012-2016 memiliki pencapaian nilai Rp. 4.128.084.900,00 .
3. Hasil koefisien korelasi adalah sebesar 0.828 (82.80%), artinya Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 berpengaruh 82.80% terhadap Gaji Pegawai Negeri Sipil golongan IV sedangkan sisanya 17.2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo, (2016), **Perpajakan (Edisi Terbaru)**, Andi Offset, Yogyakarta.
 2. Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, (2010), **Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan (Edisi Pertama)**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
 3. Resmi, Siti, (2016), **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta.
 4. Sugiyono (2014). **Analisis Inferensial**. Alfabeta : Bandung.
 5. ----- (2015), **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**, CV Alfabeta, Bandung.
 6. ----- (2009). **Populasi**. Alfabeta : Bandung.
 7. ----- (2007). **Sampel**. Alfabeta : Bandung.
- Widyaningsih, Aristanti, (2013), **Hukum Pajak dan Perpajakan**, CV Alfabeta, Bandung.